



PUTUSAN

Nomor 3759/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN DAN SAAT INI TERMOHON TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA (GHOIB);, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3759/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang Jawa Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/Kua.11.22.14/DN.01/11/2023 yang dikeluarkan pada 01 November 2023;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Jeruk Purut RT 002 RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Termohon memiliki sifat boros dalam mengelola keuangan;
 - 4.2. Antara Termohon dan orang tua Pemohon kurang harmonis, dimana Termohon diketahui kurang menghormati orang tua Pemohon sebagai seorang mertua;
 - 4.3. Termohon tidak ada usaha dalam memiliki keturunan, dimana sudah berbagai cara Pemohon untuk mengusahakan sedangkan Pemohon tidak ada itikad baik;
 - 4.4. Termohon sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Pemohon;
 - 4.5. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat dari Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa puncak kekecewaan Pemohon terjadi sejak tahun 2014 disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Termohon, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 505/PU.01.04/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2023;
7. Bahwa berhubung Pemohon merupakan seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan dan Sudah Mendapatkan Izin Cerai Nomor SIC/506/X/2023 Tentang Izin Perceraian xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Atas Nama Nana Muali; Pangkat/Korps/NRP Kopka Apm NRP 97232 Jabatan Juru Amo 2 Ru 3 Ton Morbe; Kesatuan Kima Brigif 1 Mar , yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2023;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 3759/Pdt.G/2023/PA JS. Tanggal 08 November 2023 dan tanggal 08 Desember 2023. maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/506/X/2023 Tentang Izin Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama Nana Muali; Pangkat/Korps/NRP Kopka Apm NRP 97232 Jabatan Juru Amo 2 Ru 3 Ton Morbe; Kesatuan Kima Brigif 1 Mar, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nana Mu'ali Nomor: 3174042502780002, tanggal 07 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, foto kopi tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Nana Mu'ali dengan Asmawati, Nomor: 070/Kua.11.22.14/DN.01/11/2023 yang dikeluarkan pada 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang Jawa Tengah, foto kopi tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Annas bin Hasan Mahmud**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, terakhir tinggal di jalan Jeruk Purut RT 002 RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;



- Bahwa setahu saksi semenjak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun sampai sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Atasan tempat Pemohon bekerja;
-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sambudi Riyanto bin Sumaryantri**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, terakhir tinggal di jalan Jeruk Purut RT 002 RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi semenjak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun sampai sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon seorang seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Atasan tempat Pemohon bekerja;
-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain Termohon memiliki sifat boros dalam mengelola keuangan, Termohon diketahui kurang menghormati orang tua Pemohon sebagai seorang mertua, Termohon tidak ada usaha dalam memiliki keturunan, dimana sudah berbagai cara Pemohon untuk mengusahakan sedangkan Pemohon tidak ada itikad baik, Termohon sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Pemohon dan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat dari Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga. Yang puncaknya perselisihan terjadi pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Annas bin Hasan Mahmud dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nana Mu'ali) dan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Nana Mu'ali dengan Asmawati) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, terakhir tinggal di jalan Jeruk Purut RT 002 RW 003, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi semenjak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun sampai sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon seorang seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Atasan tempat Pemohon bekerja;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pengabulan Permohonan;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Petitum Izin Mengikrarkan Talak Satu Raji

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak tahun 2014 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon Konvensi telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perlu izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum, syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sa'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.
ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS



Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3759/Pdt.G/2023/PA.JS